

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sering terjadi tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tertentu. Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran, dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah - tengah masyarakat, pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku, maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari

oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.<sup>1</sup> Dari beberapa faktor tersebut, kebanyakan dari para pelaku tindak kejahatan berdalih bahwa mereka melakukan kejahatan karena kondisi ekonomi mereka yang kekurangan. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan yang sering dilakukan dengan alasan ekonomi.

Dalam Pasal 362 KUHP disebutkan:

*“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Menurut Pasal 365 KUHP, bahwa pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang demi maksud tertentu, maka ancaman pidananya lebih berat dari tindak pidana pencurian biasa. Berbagai macam cara dan motif dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian terhadap korban, bahkan diantaranya banyak korban yang menderita kekerasan secara fisik maupun kejiwaan. Beragam bentuk kekerasan yang terjadi, seperti serangan dengan memukul (*assault and battery*), pembunuhan (*homicide*), pemerkosaan (*rape*), hingga kekerasan individu seperti bunuh diri (*suicide*).<sup>2</sup>

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1986), hlm 64.

<sup>2</sup>Santoso Thomas, *Teori-Teori Kekerasan*(Surabaya:PT.Ghalia Indonesia, 2002), hlm 9.

yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan ini menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki hukum yang mengatur negara, sehingga dapat dikatakan bahwa negara ini berusaha berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala goncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala ancaman dan bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri sendiri.

Menurut pendapat Utrecht :

*“hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”<sup>3</sup>*

Dengan ini menunjukan bahwa negara Indonesia menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan warga negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Dalam hal tindakan pelanggaran hukum tersebut, maka harus dilakukan penegakan hukum demi memperoleh keadilan. Mengenai penegakan hukum ini, ada baiknya bila dipahami mengenai penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur

---

<sup>3</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.38.

arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*). Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peranan aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.<sup>4</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>5</sup>

Pada pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencurian disertai kekerasan pada umumnya sama halnya dengan penegakan hukum tindak pidana lainnya, salah satunya terlaksana pada proses beracara pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang

---

<sup>4</sup>Sabian Utsman, , *Menuju Penegakan Hukum Responsif*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) , hlm. 31.

<sup>5</sup>Muchamad Iksan, , *Hukum Perlindungan Saksi*(Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2008), hlm. 33.

melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia.<sup>6</sup>

Menurut de Pinto :

*“Menyidik (opsporing) adalah pemeriksaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sebuah pelanggaran hukum”.*<sup>7</sup>

Didalam Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa :

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat diketahui bahwa tugas penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti lalu dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana serta guna menemukan tersangkanya.

Pada proses penyidikan akan dilakukan beberapa proses yang salah satunya adalah dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa inggris *fingerprint* atau *dactyloscopy* ini diambil untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti sidik jari tersebut akan digunakan untuk mencari tersangka atau mencocokkan dan memastikan tersangka yang sebelumnya telah diketemukan.

---

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 109.

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 120.

Sidik jari sangat penting dalam proses penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian disertai kekerasan, karena sidik jari tersebut merupakan sarana pengenalan (identifikasi) terhadap orang yang sangat akurat. Sidik jari merupakan ciri perseorangan yang tidak pernah berubah seumur hidup dan tidak ada orang yang memiliki sidik jari yang sama, sehingga dapat dikatakan dengan sistem sidik jari dianggap sebagai sarana pembuktian yang sangat mendekati kebenaran materiil bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian disertai kekerasan, bahkan bagi tindak pidana lainnya.

Sifat penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang telah ada dan sebenarnya. Di sini penulis menggunakan sidik jari (*dactyloscopy*) sebagai media yang dianggap penting dalam pembuktian sebuah tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang terjadi. Penulis tertarik lebih jauh dan meneliti bagaimana peranan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian disertai kekerasan.

Menilai pentingnya sebuah alat bukti, khususnya dalam hal ini adalah alat bukti sidik jari dalam suatu penyidikan guna menangani sebuah tindak pidana, maka dengan ini penulis akan menulis penulisan hukum dengan judul: **“Fungsi Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan di Polres Sleman”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sidik jari berfungsi dalam proses penyidikan untuk mengungkap sebuah tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Polres Sleman?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pengambilan sidik jari sehingga dapat menghambat proses penyidikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui secara jelas fungsi sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian disertai kekerasan.
  - b. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menghambat pengambilan sidik jari pada tersangka maupun pada benda-benda yang ditinggalkan pelaku di TKP atau sidik jari yang menempel maupun tertinggal di TKP.
2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. Untuk menerapkan teori yang telah penulis dapatkan di bangku perkuliahan khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian disertai kekerasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Bahwa nilai suatu penelitian ditentukan metodologinya, juga ditentukan besarnya manfaat penelitian tersebut. Manfaat penelitian rumusannya biasanya dikaitkan dengan kemanfaatan penelitian itu bagi praktek dan teori. Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Pidana.
- b. Untuk menerapkan ilmu yang bersifat teoritik, sehingga nantinya dari penelitian ini diharapkan hasilnya berguna untuk memperbanyak referensi tentang penyelesaian kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 365.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian disertai kekerasan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian disertai kekerasan.

## E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis tentang **“Fungsi Sidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Polres Sleman”**. Berdasarkan permasalahan dan cara penelitian yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan ini hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

## F. Batasan Konsep

Ada beberapa konsep mendasar yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Fungsi adalah kegunaan suatu hal.<sup>8</sup>
2. Sidik Jari adalah hasil reproduksi dari tapak-tapak jari, baik yang sengaja maupun tidak sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak tangan (*friction skin*) tangan atau kaki<sup>9</sup>
3. Alat Bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>10</sup>
4. Penyidik menurut KUHAP pasal 1 butir 4 adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Penyelidikan menurut KUHAP pasal 1 butir 2 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>8</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 322.

<sup>9</sup>Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penuntun Daktiloskopi*, subdirektori Identifikasi Direktorat Reserse Polri, hlm.2.

<sup>10</sup>Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar* (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm 107.

6. Pencurian menurut KUHP Pasal 362 adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
7. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>11</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Terkait dengan penelitian hukum yang menjadi bahan kajian adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alat bukti dan penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian akan dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>11</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 550.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01 .PW.07.03 tahun 1983, Juknis Nomor Polisi: Juknis/04/III/1991.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi pihak kepolisian di Polres Sleman, khususnya di bagian reserse identifikasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, dan studi kepustakaan.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis,

mengintepretasikan, dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan kegunaan atau fungsi sidik jari sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian disertai kekerasan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber AIPTU Hari Widiyatmo sebagai penyidik polisi Satreskrim bagian identifikasi Polisi Resort Sleman.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan judul Fungsi Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan, yang penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

## BAB II FUNGSI BUKTI SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KEKERASAN

- A. Alat Bukti Sidik Jari
  - 1. Tinjauan Umum Sidik Jari
  - 2. Sidik Jari Sebagai Alat Bukti
  - 3. Cara Pengambilan Sidik Jari
  - 4. Metode Pengambilan Sidik Jari
- B. Sidik Jari Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Tindak Pidana
  - 1. Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan
  - 2. Contoh Kasus Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Sleman
- C. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan
  - 1. Fungsi Sidik Jari dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan
  - 2. Kendala yang Menghambat Pengambilan Sidik Jari di TKP

## BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

